

PENYELUNDUPAN SENJATA KE WILAYAH INDONESIA¹

Poltak Partogi Nainggolan²

Diterima 31 Oktober 2011, disetujui 13 Desember 2011

Abstract

The article on weapons smuggling is a descriptive-analytical research which applies a qualitative method. Data was gathered through library research and fieldworks, and series of in-depth interviews. Its research findings reveals Indonesia's regions which are vulnerable from weapons smuggling, particularly along the country's seaborders with South China Sea and Pacific Ocean, as well as along its borders with Malaysia, Thailand, and the Philippines. The research results also disclose that non-state and traditional actors' involvements in weapons smuggling are difficult to be overseen. In addition to this, globalisation and the rise of the non-state actors' role post-Cold War give a threat to domestic security.

Keywords: weapons smuggling, guns, rifles, archipelagic state, border, frontier, remote islands, outer islands

Abstrak

Tulisan ini adalah hasil penelitian tentang penyelundupan senjata, yang merupakan penelitian deskriptis-analitis menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan riset lapangan, serta serangkaian wawancara mendalam. Temuan penelitian mengungkapkan wilayah-wilayah Indonesia yang rawan penyelundupan senjata, terutama di sepanjang pantai Indonesia yang berbatasan dengan Laut Cina

¹ Penelitian yang dilakukan pada tahun 2011. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. Rusdi Syara yang telah memberikan berbagai kritik, komentar, masukan dan saran-saran perbaikan untuk tulisan ini.

² Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, MA adalah Peneliti Utama IV/e untuk bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional di Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR, dapat dihubungi di: pptogin@yahoo.com

Selatan dan Samudera Pasifik, dan yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia, Thailand dan Filipina. Aktor non-negara dan tradisional sulit diawasi dari keterlibatan mereka dalam aktifitas penyelundupan senjata. Globalisasi dan meningkatnya peran aktor nonnegara pasca-Perang Dingin membuat kasus ini turut memberikan ancaman terhadap keamanan domestik.

Kata kunci: penyelundupan senjata, senjata api, negara kepulauan, perbatasan, pulau perbatasan, pulau terluar

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sejak transisi demokrasi bergulir di tahun 1998, kondisi keamanan domestik Indonesia belum dapat dikatakan stabil dan aman. Konflik-konflik lokal yang mudah muncul, bukan saja menjadi tolak ukur dari belum amannya kondisi keamanan domestik negara, namun juga banyaknya senjata ilegal yang beredar di masyarakat dan telah digunakan dalam berbagai peristiwa konflik dan juga kejahatan di masyarakat. Konflik separatis di Aceh dan sektarian di Maluku dan Poso memang sudah reda, namun konflik separatis lain seperti di Papua seringkali sering muncul kembali di permukaan. Di luar itu, tindak kejahatan di masyarakat semakin memprihatinkan, karena jenis senjata yang digunakan semakin beragam. Pada dasawarsa-dasawarsa lalu, para pelaku tindak kejahatan baru maksimal menggunakan berbagai jenis senjata api genggam atau laras pendek (pistol) seperti FN, colt, revolver, challenger, Browning, Walther, Wesem, Sport Waffen, Armes dan sebagainya tetapi belakangan ini telah memakai berbagai jenis senjata api laras panjang seperti Makarov, Remington cal 22, SS-1, SS-2, Uzi, M-16, AK-17, AK-47, M-58, dan AR-15. Ini termasuk yang digunakan dalam tindak kejahatan teroris yang marak belakangan ini, yang melibatkan pelaku jaringan teroris di kawasan Asia Tenggara seperti kelompok Jamaah Islamiyah (JI), Mujahidin Kompak, Laskar Jundullah, Darul Islam wilayah Banten.³

³ "Kulakan Senjata ke Mindanao," *Viva News*, 24 September 2010, <http://sorot.vivanews.com/news/read/179464-jejak-gerilya-filipina-k...>

Terbongkarnya pelatihan teroris di Aceh pada Maret 2010 tahun lalu dan rencana penyerangan yang akan dilakukan mereka yang menamakan diri kelompok "Al Qaidah Serambi Mekkah," di Bukit Jalin, Jantho, Aceh Besar yang ditengarai berencana melakukan serangan ke pemerintah pusat di Jakarta, telah membuka perhatian orang terhadap asal atau sumber senjata yang mereka gunakan, dan juga bagaimana mereka mendapatkannya. Kemudian, beberapa bulan sesudahnya, yakni Agustus 2010, warga kota Medan dikejutkan oleh terjadinya peristiwa perampokan bersenjata terhadap Bank CIMB Niaga yang diduga melibatkan kelompok teroris bersenjata yang telah berhasil mengungkap pelatihan dan rencana aksi mereka sebelumnya.⁴ Tentu saja, kejadian ini tidak hanya merupakan tantangan bagi kepemimpinan Kapolda yang baru dilantik, Mayjen Pol. Oegroseno, tetapi juga bagi situasi keamanan domestik negara, mengingat target kelompok bersenjata itu adalah pemerintah nasional yang akan berdampak pada situasi keamanan domestik secara menyeluruh. Selanjutnya, hanya dalam tempo sebulan setelah itu, pada September 2010, terjadi serangan senjata brutal terhadap Markas Polisi Sektor (Mapolsek) Hamparan Perak Deli Serdang, Sumatera Utara, yang telah menimbulkan pertanyaan tentang dari mana asal senjata-senjata laras panjang yang digunakan kelompok tersebut. Aksi ini diduga erat kaitannya dengan peristiwa sebelumnya, setelah polisi menembak mati tiga orang yang diduga pelaku perampokan bank CIMB Niaga Medan. Masalahnya, bukan hanya kelompok bersenjata yang diduga telah dan akan melancarkan aksi-aksi teroris yang patut diprihatinkan dengan aksi-aksi brutal mereka, tetapi juga bagaimana asal-usul berbagai senjata yang diketahui digunakan mereka, antara lain AK-47, SS-1, dan M-16.

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Secara geografis Indonesia memiliki posisi strategis di Asia Tenggara, berada antara Samudera Hindia dan Pasifik, dan memiliki selat-selat penting, seperti Selat Malaka dan Selat Lombok, serta dibatasi oleh 12 negara di darat, laut dan udara. Menurut catatan Dehidros tahun 1967 Indonesia juga memiliki 17.508 pulau, atau 17.480 pasca-tsunami Aceh tahun 2004, atau 13.208 berdasarkan hitungan realistik tahun 2007.⁵ Selain itu, negeri ini juga

⁴ Lihat "Perampokan Bank CIMB Niaga Medan: Kapolda: Sumut Rawan Penyelundupan Senjata Api," *VHRmedia.com*, 19 Agustus 2010, <http://www.vhrmedia.com/Kapolda-Sumut-Rawan-Penyelundupan-Sen...>

⁵ Penjelasan Prof. Dr. Rizald Max Rompas, Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia, dalam FGD di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2011.

mempunyai 95.181 kilometer garis pantai, keempat terbesar di dunia setelah Kanada, Amerika Serikat, dan Rusia, dengan 92 pulau terluar yang mengelilingi perairan yang ada.⁶ Dengan demikian, baik secara geostrategis, geopolitik, maupun geoekonomi, negara Indonesia posisinya menjadi amat penting bagi banyak negara dan pihak. Wilayah yang luas itu, kekayaan alam (SDA) yang dimilikinya dengan kontribusi sekitar 23,5% dari bidang kelautan,⁷ dan wujudnya sebagai negara kepulauan memberi daya tarik bagi para pelaku bisnis dan kejahatan transnasional. Hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai sasaran yang rawan dari berbagai bentuk tindak penyelundupan sebagai salah satu kejahatan transnasional, termasuk tindak kejahatan penyelundupan senjata.

Aksi-aksi bersenjata yang menggunakan senjata laras pendek dibandingkan dengan yang menggunakan senjata laras panjang memiliki perbedaan dalam menimbulkan implikasi yang dihasilkan dan mencapai tujuan yang diinginkan kelompok pelakunya. Juga, dari perpektif kualitas aksi, penggunaan senjata kaliber ringan dan berat terdapat perbedaan. Namun, di luar itu, terdapat masalah yang lebih serius yang perlu dipertanyakan, yaitu mengapa begitu mudahnya kelompok-kelompok bersenjata melakukan aksinya dengan menggunakan berbagai jenis senjata tersebut? Dari mana mereka memperolehnya?

Dalam konteks ini, pertanyaan penelitian yang hendak dijawab adalah dari negara mana saja asal senjata-senjata selundupan tersebut? Bagaimana kaitannya dengan konflik-konflik dan bisnis senjata di negara asal, khususnya negara tetangga itu? Lalu, apa motivasi dari para pelaku kejahatan kejahatan transnasional ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan DPR untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam mengelola keamanan, terutama di matra laut atau perairan. Hasil penelitian lapangan yang komprehensif dapat membantu anggota Komisi I, Komisi IV dan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) dalam rapat-rapat kerja dengan mitra pemerintah terkait. Secara khusus, laporan penelitian dapat dikontribusikan bagi Badan Legislasi dalam menyusun legislasi, dan

⁶ *Ibid.*

⁷ Penjelasan Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto, MS, Kepala Pusat Kajian Sumber-daya Pesisir dan Lautan IPB dalam wawancara di Bogor pada 11 Agustus 2011.

untuk Panitia Khusus RUU yang terkait masalah-masalah perbatasan, kelautan, dan kejahatan transnasional.

D. Kerangka Pemikiran

Penyelundupan senjata sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional merupakan ancaman, baik terhadap keamanan individu dan masyarakat maupun terhadap keamanan nasional. Motivasi pemilikan senjata oleh perorangan bermula dari terancamnya keamanan individu karena tidak segera direspons atau dilindungi aparat keamanan pemerintah atau negara. Keamanan individu yang menjadi kebutuhan hak asasi warga tidak diberikan dan dijamin negara.

Perkembangan globalisasi yang cepat dan kompleks berimplikasi pula pada munculnya kian beragam kejahatan transnasional dan para pelakunya. Hal ini menyebabkan semakin kompleksnya ancaman keamanan dunia di setiap negara, sehingga semakin sulit pula upaya untuk mengatasinya.⁸ Studi keamanan dan hubungan internasional pasca-Perang Dingin mengemukakan besarnya peran aktor non-negara, yang akan berkompetisi dengan aktor-aktor formal negara, dan membuat analisis terhadap hubungan internasional semakin tidak sederhana. Buzan dan kawan-kawan terkait dengan hal ini membagi 3 tipe unit yang terlibat, yaitu *referent objects*, *securitizing actors*, dan *functional actors*.⁹ *Referent objects* dimaksudkan di sini sebagai segala sesuatu yang tampak terancam dan mempunyai sebuah klaim yang absah untuk mempertahankan diri. *Securitizing actors* adalah para aktor yang men-sekuritisasi berbagai isu dengan menyatakan sesuatu— *referent object*— secara eksistensial terancam. Sedangkan *functional actors* dijelaskan disini sebagai para aktor yang mempengaruhi dinamika dari sebuah sektor. Tanpa menjadi *referent object* atau aktor yang mendefinisikan keamanan atas nama *referent object*, dalam hal ini ia adalah seorang aktor yang secara signifikan mempengaruhi keputusan-keputusan di bidang keamanan.¹⁰

Dari perspektif ekonomi politik penyelundupan senjata dijelaskan hubungannya dengan berbagai motif ekonomi atau bisnis untuk mencari keuntungan finansial individual dan kelompok, di samping terdapat pula

⁸ Robert Harvey, *Global Order*, Carrol and Graf, 2003.

⁹ Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner, 1998: 36.

¹⁰ *Ibid.*

kepentingan politik kelompok yang tengah memperjuangkan kemerdekaan, pemisahan diri, dan melakukan berbagai aksi pemberontakan (kerusuhan), atau juga hendak mempertahankan diri dari ancaman lawan. Dalam konteks ini, pasar jual-beli senjata terkait aktifitasnya dengan perkembangan situasi di daerah konflik di sekitarnya, bahkan juga di daerah yang jauh sama sekali. Kemajuan teknologi yang dipermudah oleh globalisasi telah memungkinkan berlangsungnya berbagai bentuk kegiatan penyelundupan senjata ke wilayah-wilayah yang jauh letaknya, yang justru semakin ideal bagi kegiatan ini, karena kian sulit dicegah dan diatasi, apalagi jika aparat keamanan di negara yang terancam sangat terbatas peralatan dan kemampuannya.

Bertemunya kepentingan pensuplai, penjual, perantara dan pembeli senjata ilegal telah memungkinkan terciptanya interaksi mereka. Kondisi anarki dan ketidakamanan¹¹ di daerah tujuan penyelundupan yang meningkat akibat konflik antar-warga, kelompok (sektarian), ataupun berhadap-hadapan dengan elit penguasa (separatis) selalu menjadi incaran para pelaku kegiatan penyelundupan senjata. Kemiskinan, pertentangan, disharmoni antar-kelompok, kekosongan kekuasaan, atau inkapabilitas pemerintah setempat dapat menjelaskan mengapa penyelundupan senjata memberi dampak pada keamanan individu, keamanan masyarakat, keamanan nasional dan keamanan kawasan. Keamanan dalam bentuk yang terbatas, yakni individu dan masyarakat,¹² akan terancam oleh kegiatan penyelundupan senjata sekalipun jenis senjata yang diperjualbelikan secara ilegal melalui berbagai aksi penyelundupan termasuk kaliber ringan. Sementara, keamanan nasional dan kawasan menjadi terancam jika pasar penjualan senjata ilegal yang tercipta melalui aksi penyelundupan meluas dan semakin besar dan berbahaya jenis-jenis senjata api yang diperdagangkannya, bahkan di sini termasuk roket, granat, bazoka, peluncur roket, peluncur granat, dan berbagai jenis senjata berat dan amunisinya.

Yang patut diperhatikan dalam analisis hubungan di antara keamanan individual, masyarakat, nasional dan internasional adalah (1) sekalipun keamanan individual merepresentasikan suatu tingkat analisis yang berbeda dan penting, keamanan individual tersubordinasi kepada struktur politik yang lebih tinggi dari keamanan nasional dan sistem internasional. Karena

¹¹ Lihat pula hal 124-126, *ibid*.

¹² Lihat logika dan relevansi keamanan individu dan keamanan masyarakat, Barry Buzan, *People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, New York, Harvester Wheatsheaf, 1991: 35-39.

pemahaman ini pula keamanan nasional dan internasional direduksi menjadi keamanan individual; (2) Keamanan individual dipengaruhi secara positif dan negatif oleh negara, dan alasan bagi terciptanya disharmoni antara keamanan individual dan nasional merepresentasikan sebuah kontradiksi yang permanen; (3) Upaya individu dalam memperoleh keamanan mempunyai pengaruh yang beragam pada keamanan nasional. Selanjutnya, dalam kondisi hubungan negara dan warganya sangat terasing, kekacauan domestik akan mengancam koherensi negara dalam cara-caranya memelihara keamanan nasional.¹³

E. Metodologi

1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan sejak awal Maret 2011 hingga akhir Oktober 2011. Lokasi penelitian lapangan adalah di Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Adapun penelitian lapangan di Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Utara dilakukan lebih dulu dari penelitian lapangan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara

Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Kepulauan Riau dipilih karena letaknya yang strategis, dekat dengan kawasan perdagangan bebas Batam, yang rawan dari kegiatan penyelundupan senjata. Begitu pula dengan Provinsi Sulawesi Utara, yang berbatasan langsung dengan wilayah Filipina Selatan, yang sejak lama dilanda konflik separatisme dan menjadi sumber perdagangan senjata gelap yang mengalir ke berbagai wilayah Indonesia.

Provinsi Maluku dipilih karena wilayah ini bekas berlangsungnya konflik separatisme di tanah air, kemana berbagai jenis senjata mengalir secara ilegal dari berbagai negara. Kemudian, setelah berakhirnya (pasca) konflik, diantisipasi terjadi pengaliran senjata secara ilegal dari provinsi tersebut ke wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Provinsi Maluku Utara dipilih sebagai lokasi karena ia merupakan wilayah yang rawan dari penyelundupan senjata, selain juga berbatasan langsung dengan wilayah Filipina Selatan, di bibir Samudera Pasifik. Selama ini, wilayah kepulauan ini dikenal sebagai wilayah yang rawan dari ancaman berbagai bentuk kejahatan transnasional. Kedua provinsi yang dulu menjadi satu itu, merupakan wilayah yang dicurigai sebagai tempat transit senjata ilegal dari kawasan konflik di Filipina Selatan.

¹³ *Ibid*: 54-55.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah kombinasi penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptis-analitis, yang mendeskripsikan informasi dan data yang diperoleh, lalu menganalisisnya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari informasi yang tersedia secara tertulis, termasuk berita, laporan liputan, atau hasil investigasi media cetak dan elektronik. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah mereka yang bekerja di institusi keamanan negara seperti di kepolisian daerah dan militer (Tentara Nasional Indonesia), terutama pihak-pihak yang pekerjaannya berhubungan dengan pengawasan peredaran, perijinan, dan penggunaan senjata. Secara spesifik, informan di sini adalah pejabat di Bea Cukai, Badan Penanggulangan Terorisme, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resort (Polres), Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resort Militer (Korem), ataupun kalangan individual yang mengetahui tentang masalah konflik, senjata, bisnis dan kasus-kasus penyelundupannya.

3. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui teknik di atas, di *cross-check* melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak di institusi yang relevan. Data inilah yang kemudian dibahas dan dianalisis untuk membuat penilaian dan menarik kesimpulan, serta memberikan rekomendasi.

II. Temuan Penelitian

A. Wilayah Rawan Penyelundupan Senjata

1. Penyelundupan Senjata melalui Provinsi Sumatera Utara

Di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dari investigasi atas kasus perampokan atas Bank CIMB Niaga Kota Medan yang menewaskan seorang polisi, terdapat kecurigaan berbagai jenis senjata yang digunakan, yakni AK-47 dan SS-1 yang dipakai para perampok yang diduga terkait dengan jaringan terorisme berasal dari bekas daerah konflik separatis Aceh, selain jenis senjata

M16 yang direbut dari petugas kepolisian setempat.¹⁴ Kaitan dengan jaringan terorisme terkuak dari adanya hubungan yang terdeteksi dengan mereka yang menamakan dirinya sebagai "Al-Qaidah Serambi Mekah." Di samping itu, yang lebih signifikan, adalah kemungkinan senjata yang mereka gunakan masuk secara ilegal dari bekas wilayah konflik tersebut, yang juga bisa berasal dari aksi pembobolan gudang senjata, pembelian di daerah konflik, dan belanja di negeri tetangga.¹⁵ Ini artinya, apa yang bisa didefinisikan sebagai penyelundupan bersumber dari pembelian di daerah konflik dan belanja di negeri tetangga. Selanjutnya, dalam aksi penyerangan kelompok bersenjata ke Mapolsek Hamparan Perak, yang juga telah tercium memiliki hubungan dengan aksi perampokan atas Bank CIMB Niaga di Kota Medan, terdapat korelasi atau merupakan satu rangkaian aksi yang telah diorganisasi oleh kelompok teror yang sama. Aparat Kepolisian Kota Medan yang memburu dan berhasil menembak mati tiga orang dari para pelaku menemukan fakta bahwa para pelaku telah menggunakan jenis senjata yang sama, yang diperkirakan berasal atau diperoleh dari luar wilayah atau dengan modus penyelundupan.¹⁶

Dari penggrebekan atas kamp pelatihan terorisme di Lamkabeu, Aceh, aparat keamanan berhasil menemukan sejumlah senjata yang berasal dari Filipina Selatan.¹⁷ Secara spesifik dijelaskan bahwa jalur perairan yang berada di sekitar wilayah Filipina sangat rawan dari berbagai bentuk penyelundupan senjata. Masalahnya, para pelaku yang dapat menggunakan perahu-perahu nelayan lokal yang kecil, dapat membuang senjata ke laut ketika mereka kepergok patroli aparat keamanan Indonesia, Filipina, atau kegiatan patroli bersama. Wilayah perairan yang melintasi Pulau Sumatera diketahui lalu-lintasnya merupakan yang terpadat di dunia. Sehingga, pembuatan 12 radar di sepanjang pantai Pulau Sumatera tidaklah cukup, apalagi dengan mengandalkan hibah radar dari AS, yang mencapai duapertiganya.¹⁸

Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangkoarmabar), Laksamana Muda TNI Muallimin Santoso, pada 12 Agustus 2010

¹⁴ Fidel Ali Permana, "Perampokan Merajalela," *Media Indonesia*, 21 Agustus 2010, *Bataviase.co.id*, <http://batavia.co.id/node/35089>; Lihat juga, Nezar Patria, Suryanta Bakti Susila, Iwan Kurniawan, "Membongkar Jejak Senjata Teroris," *Viva News*, 24 September 2010, <http://sorot.vivanews.com/news/read/179459-melacak-jejak-senjata-haram>.

¹⁵ Nezar Patria, Suryanta Bakti Susila, dan Iwan Kurniawan, *ibid*.

¹⁶ "Perampokan Bank CIMB Niaga Medan: Kapolda: Sumut Rawan Penyelundupan Senjata Api," *VHRmedia.com*, <http://www.vhrmedia.com/Kapolda-Sumut-Rawan-Penyelundupan-Sen>

¹⁷ "Kolaborasi Indonesia-Filipina demi Eliminasi Penyelundupan Senjata," *Media Indonesia*, 22 Maret 2010, <http://www.Media-indonesia.com/read/2...ndupan-Senjata>

¹⁸ *Ibid*.

mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki tiga titik wilayah perairan yang rawan yang sering digunakan sebagai jalur penyelundupan senjata dan bahan peledak untuk mendukung gerakan separatisme dan aksi-aksi terorisme.¹⁹ Tiga titik rawan itu adalah Selat Singapura, Selat Malaka, dan Selat Sunda, yang sebagian besar senjata yang diselundupkan telah dipergunakan selama ini untuk mendukung gerakan separatisme di Aceh. Dengan demikian, Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Sumatera Utara, merupakan wilayah yang rawan dilintasi penyelundupan senjata karena letaknya dikelilingi oleh ketiga selat tersebut. Selama ini, dari berbagai aksi pemblokiran wilayah perairan Aceh yang telah dilaksanakan oleh kekuatan TNI-AL, aparat keamanan laut itu telah banyak menangkap kapal-kapal nelayan asing, terutama di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura, yang membawa sejumlah senjata. Sebagaimana dikemukakan Pangkoarmabar, dari sejumlah barang bukti yang disita belakangan ini aksi penyelundupan senjata dan sebagian bahan peledak melalui jalur laut dari negara lain ke Indonesia cenderung meningkat

Dalam kasus yang berbeda, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara telah membekuk 8 orang pemasok senjata api yang dipimpin Daud Puteh pada 15 Januari 2004.²⁰ Para pemasok ini diduga memperoleh senjata api dari wilayah Thailand Selatan. Daud Puteh dan kelompoknya telah tertangkap basah akan mengirim 9 pucuk senjata api jenis AK-47, M-16, dan pistol kepada Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di daerah Idi Rayeuk, Aceh Selatan. Ia mengaku telah memasok senjata api sejak 2001.

Bersama Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara juga telah menahan Nazariah dan Fauzi di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, pada 7 Februari 2004.²¹ Polisi gagal mendapatkan barang bukti senjata dari para tersangka, namun berhasil memperoleh beberapa dokumen terkait dengan transfer dana, buku tabungan BNI dan Mandiri, dan *handphone*. Di samping itu, polisi juga telah menyita satu mobil kijang kapsul baru dan satu angkutan umum, yang diperkirakan berasal dari hasil penjualan senjata api. Dari hasil investigasi, sebanyak 40 pucuk senjata api dari berbagai jenis asal Thailand telah diselundupkan ke Provinsi Sumatera Utara oleh kelompok yang tertangkap itu.²²

¹⁹ "Tiga Titik Perairan Indonesia Rawan Penyelundupan Senjata Api," Kementerian Pertahanan RI, <http://www.dephan.go.id/-/modules.php?name=News&file=article&si...>

²⁰ "Senjata Ilegal di Jakarta," *Majalah Trust.com*, <http://www.majalahtrust.com/verboden/verboden/503.php>.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

2. Penyelundupan Senjata melalui Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu pintu gerbang Indonesia ke mancanegara yang sangat rawan terhadap kasus-kasus penyelundupan senjata, karena posisi pulau-pulaunya yang tersebar luas dan terpencil, sehingga banyak 'jalur-jalur tikus' yang sulit diawasi oleh aparat keamanan. Dengan luas wilayah 252.601 km persegi, terdiri dari 95% lautan,²³ dan perbatasannya dikelilingi oleh negara tetangga, seperti Vietnam, Kampuchea, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dan dibatasi oleh laut dan selat, yakni Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Selat Karimata, dengan sebanyak 40 persen dari 2.408 pulau besar dan kecil belum bernama, Kepulauan Riau amat rawan terhadap ancaman keamanan yang datang dari luar kawasan, termasuk kegiatan penyelundupan senjata.

Kepulauan Natuna adalah salah satu bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang kaya sumber daya alam dan laut, selain sangat strategis, sekaligus rawan dari pemanfaatan kegiatan laut yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan nasional. Sama hal kondisinya dengan Pulau Nipah, yang juga merupakan salah satu pulau terluar, yang masih merupakan wilayah Batam dan berbatasan langsung dengan negara Singapura. Letaknya yang tepat di Selat Malaka, yang merupakan urat nadi lalu lintas perdagangan terpadat di dunia, dengan kepadatan kapal dagang sekitar 50 ribu yang lalu lalang setiap tahunnya,²⁴ menyebabkan daerah ini rawan dari berbagai bentuk kejahatan transnasional, apalagi dengan kondisi pengamanan operasional Angkatan Laut RI yang terbatas personil dan peralatannya.

Menurut sumber Kementerian Pertahanan, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Selat Sunda merupakan titik-titik rawan yang kerap dilaporkan sebagai sumber penyelundupan senjata api dan bahan peledak. Ketika konflik separtisme memuncak di Aceh, pihak TNI AL telah mengawasi penyelundupan senjata oleh kapal-kapal nelayan asing di perairan Selat Singapura dan Selat Malaka, yang diduga akan dibawa ke Serambi Mekah tersebut untuk mendukung gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka.²⁵

²³ Website resmi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, <http://www.kepri.go.id>, 1 Januari 2009, diakses pada 21 April 2011.

²⁴ Lihat "Jabatan Pangdam I/BB Diserahterimakan," website TNI, <http://server.tni.mil.id>, di-akses 21 April 2011.

²⁵ Ismoko Widjaya, "Titik Panas Indonesia-Malaysia," *Vivanews*, <http://wap.vivanews.com/news/read/171252>, 16 Agustus 2010, diakses pada 21 April 2011.

Aparat keamanan pemangku kepentingan Bakorkamla, yakni Bea Cukai, telah 3 kali berhasil menangkap kapal yang menyelundupkan senjata api atau bahan peledak. Dalam kasus pertama, Kapal Fungka Sejahtera tertangkap mengangkut 75 ton bahan peledak ammonium nitrat pada 18 Nopember 2009. Kapal kedua, yaitu KLM Pratama, tertangkap mengangkut 60 ton pada Maret 2010. Sedangkan yang kapal ketiga, yakni KM Salbiana Jaya, ditangkap di perairan Laut Cina Selatan pada 12 Desember 2010 dengan muatan 50 ton ammonium nitrat. Kapal tersebut diketahui berangkat dari Pasir Gudang, Malaysia, dengan tujuan Pulau Selayar Sulawesi Selatan, namun tertangkap setelah dicurigai dan dibongkar muatannya oleh Bea Cukai Kepulauan Riau.²⁶

Kompleksnya kasus-kasus penyelundupan di Provinsi Kepulauan Riau diungkapkan oleh Wakil Direktur Polisi Air Provinsi Sumatra Utara, AKBP Tulus J, dan Kepala Bagian Operasi, AKBP RF Siringoringo.²⁷ Kondisi demikian disebabkan oleh letak Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar dan luas sebarannya. Juga, banyak pintu masuk ilegal atau pelabuhan tikus yang sulit dikontrol, apalagi dengan kondisi aparat dan dukungan alat kerja, terutama kapal-kapal patroli sebagai alat utama (alut), yang terbatas, termasuk fasilitas BBM-nya. Wakil Direktur Polisi Air Provinsi Sumatra Utara, Tulus J, yang pernah bertugas di Provinsi Kepulauan Riau mengatakan daerah ini jauh lebih rawan dari kasus-kasus penyelundupan senjata dibandingkan dengan Provinsi Sumatra Utara. Dengan demikian, pengawasan seluruh wilayah kepulauan tersebut dari tindak pidana dimaksud menjadi jauh lebih sulit.²⁸

Senada dengan itu, berdasarkan presentasi dan keterangan Komandan Lantamal I, Laksmana Pertama Amri Husaini, terungkap bahwa tantangan dan ancaman keamanan di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau jauh lebih besar daripada yang dihadapi di sekitar wilayah perairan Provinsi Aceh Naggroe Darussalam. Hal ini dapat dilihat dari lebih banyaknya kasus-kasus yang terjadi dan besarnya gelar kekuatan Lantamal I di sana, yakni dengan 14 Patroli Keamanan Laut (Patkamla) di Lanal Tanjung Balai dan 7 Patkamla dan 2 kapal di Lanal Dumai, atau jauh lebih banyak dibandingkan dengan di Lanal Sabang, Lhoksemawe, dan Simeulue, yang masing-masing memiliki 6 Patkamla dan 2 kapal, 7 Patkamla dan 1 Patkamla.²⁹

²⁶ "Bakorkamla akan Bahas Penyelundupan Bahan Peledak," *Antara*, 24 Desember 2010.

²⁷ Wawancara dengan Wakil Direktur Polisi Air Provinsi Sumatra Utara, Tulus J, dan Kepala Bagian Operasi, RF Siringoringo, di Belawan pada 25 Mei 2011.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Bahan presentasi di Lantamal I, Belawan, pada 26 Mei 2011.

Maraknya kasus penyelundupan, terutama pasca-penetapan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, dan luasnya wilayah pulau-pulau di sepanjang pantai yang sulit diawasi, namun mudah didarati kapal-kapal dari luar, membuat wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau sangat rawan terhadap kegiatan ekonomi ilegal ataupun kejahatan penyelundupan. Bukan tidak mungkin yang menjadi sasaran untuk diselundupkan bukan hanya narkoba dan pakaian bekas, namun juga senjata api dan material (pupuk dan bahan-bahan kimia lain) yang dapat dibuat sebagai bahan peledak. Bisa lolosnya selama ini barang-barang selundupan seperti shabu-shabu dari pengawasan di negara tetangga menjadi pertanyaan.³⁰ Padahal diketahui, baik untuk memasukkan atau mengeluarkan barang-barang secara ilegal ke dan dari Malaysia, tidaklah mudah karena sangat ketatnya kontrol bea-cukai, pabean dan imigrasinya.

3. Kasus Penyelundupan Senjata melalui Jalur Filipina Selatan

Jalur perairan Filipina Selatan-Sulawesi Utara dikenal sebagai jalur lama penyelundupan senjata api. Ketika beberapa wilayah Indonesia di Barat, Tengah dan Timur sedang bergolak pada awal era reformasi, jalur perairan ini banyak dimanfaatkan untuk memasukkan senjata api. Delapan tersangka penyelundup senjata api, yang seluruhnya warga Sulawesi Utara, telah ditangkap oleh Polres Sangihe Talaud. Mereka berusaha memasukkan senjata api dari General Santos City, Filipina Selatan, ke Sulawesi Utara. Dari mereka, disita 2 pucuk pistol FN, 3 pistol model S&W kaliber 38 mm, 11 senjata laras panjang, dan 170 butir peluru. Empat tersangka ditangkap di atas kapal motor Daya Sakti sewaktu akan memasuki pelabuhan Bitung pada 22 Pebruari 2000. Sedangkan 4 lainnya ditangkap dalam perjalanan antara Pulau Buang dan Tinakareng, Sangihe Talaud pada 24 Peruari 2000. Penyelundupan senjata api ini dapat segera dicegat berkat laporan masyarakat di Pelabuhan Bitung dan Sangihe Talaud. Berdasarkan pengakuan tersangka, senjata-senjata api itu akan dikirim ke Maluku karena ada pesanan pihak tertentu.³¹ Sebelum penangkapan ini, dikabarkan sudah ada pengiriman senjata ilegal yang berhasil lolos.³²

³⁰ Wawancara dengan Komandan Lantamal-1, Laksmana Pertama Amri Husaini, di Belawan pada 26 Mei 2011; wawancara dengan Wakil Komandan Lantamal-1, Kolonel Marinir Suprayogi, di Belawan pada 26 Mei 2011; wawancara dengan Asisten Intel Lantamal-1, Kolonel (L) Agus Irianto, di Belawan pada 26 Mei 2011; wawancara dengan Kepala Dinas Hukum Lantamal-1, Letkol (Laut) Leonard Marpaung, di Belawan pada 26 Mei 2011.

³¹ Landy Wowor, "Senjata Selundupan: Senjata Leawat Jalur Lama," *Gatra*, No. 18/VI, 18 Maret 2000: <http://www.gatra.com/VI/18/NAS2-18.html>.

³² *Ibid.*

Jalur Mindano (Filipina Selatan)-Sulawesi Utara dikenal rawan untuk tindak kejahatan penyelundupan senjata. Diketahui, sejak abad 15-16, jalur perairan ini telah digunakan untuk kegiatan perniagaan tradisional dan regional. Sejak dulu banyak diperniagakan di sana barang-barang kelontong, tekstil, dan hasil bumi oleh penduduk asal berbagai negara, terutama asal Sulawesi dan Filipina, dan barang-barang elektronik pada masa sekarang. Ketika konflik marak di wilayah Filipina Selatan dan Indonesia, senjata api menjadi komoditi yang menarik diperdagangkan secara gelap. Karena konflik di daerah asalnya, banyak warga yang menetap sementara di Mindano Selatan, Pulau Balud, dan Saranggane, lalu kembali ke Halmahera membawa senjata api. Senjata api dibawa untuk melindungi diri ketika mereka kembali ke daerah asal yang masih dilanda konflik.

Sejak lama di wilayah Filipina Selatan senjata api bebas diperdagangkan .namun, sejak pertengahan tahun 1980-an, Pemerintah Filipina menertibkannya.³³ Di luar itu, yang berlangsung adalah perdagangan gelap senjata api. Untuk menghentikan kegiatan jaringan penyelundup senjata api, Polda Sulawesi Utara melakukan kerja sama dengan Pemerintah Filipina melalui Konjen-nya yang ada di kota Manado. Konjen Filipina yang mantan polisi telah memudahkan dilakukannya kerja sama untuk menghentikan aksi penyelundupan yang terjadi melalui wilayah perairan perbatasan kedua negara. Ketegasan Polda Sulawesi Utara, yang didorong oleh upaya untuk meredam konflik di Maluku, telah membantu secara signifikan upaya memberantas aksi penyelundupan senjata api.

Dewasa ini, setelah konflik berakhir di Aceh, Maluku dan Poso, kegiatan penyelundupan senjata menurun. Masih adanya aksi-aksi terorisme yang dilakukan aktor non-negara, seperti di Poso, wilayah Sulawesi Tengah, menyebabkan senjata api sebagai barang yang tetap dibutuhkan untuk diselundupkan. Penangkapan secara sporadis selama ini telah berhasil dilakukan, lewat operasi, penggeledahan dan penyitaan, sekalipun tidak dalam frekuensi yang tinggi. Tetap rawannya jalur perairan Filipina Selatan-Sulawesi Utara dari aksi penyelundupan senjata api diakui kalangan aparat keamanan, yakni Polisi Air dan AL (Lantamal), dan juga kalangan awam, seperti nelayan.³⁴ Karena itulah pihak Lantamal telah merencanakan membangun pangkalan angkatan laut (lanal) di perairan perbatasan (dengan Filipina) terluar, yakni di

³³ *Ibid.*

³⁴ Rangkain wawancara dengan kalangan nelayan Antra, Polisi Air, dan Lantamal masing-masing di Manado, Bitung, dan Manado pada 4, 6 dan 7 Juli 2011, .

Melonguane, di Kabupaten Kepulauan Talaud. Langkah ini dinilai penting untuk mendekatkan pengawasan perbatasan. Selama ini Lantamal VIII kesulitan untuk melakukan kordinasi pengawasan untuk perairan perbatasan terluar melalui Kota Manado, khususnya untuk pengamanan wilayah Laut Talaud yang berbatasan dengan Filipina Selatan.³⁵

Senjata-senjata selundupan asal Filipina Selatan mengalir masuk ke wilayah Kepulauan Maluku, menjangkau hingga Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku. Senjata-senjata selundupan itu masuk melewati pulau-pulau kecil di Provinsi Sulawesi Utara sebelum masuk jauh ke wilayah perairan kedua provinsi ini.³⁶ Konflik primordial yang melebar dari Ambon hingga ke kawasan Tobelo, Galela, Lolada, Wasela, Halmahera (Utara, Timur dan Selatan), Ternate, Tidore dan sebagainya telah membuat lalu lintas senjata gelap marak menuju ke berbagai wilayah tersebut.³⁷ Banyaknya pulau-pulau kecil tersebar di sekitar kedua provinsi di bagian terluar Indonesia Timur yang dekat dengan Samudera Pasifik itu membuat aparat keamanan, terutama AL, sulit mengawasi, apalagi mencegahnya.³⁸ Begitu pula dengan terbatasnya kapasitas yang dimiliki aparat keamanan laut Indonesia yang bertanggung jawab atas wilayah perairan itu.³⁹ Dengan masih lemahnya mentalitas oknum aparat negara yang menjaga keamanan di kawasan perairan tersebut, karena masih dijumpainya oknum-oknum yang melanggar disiplin, kawasan jalur perairan di perbatasan Filipina Selatan hingga Provinsi Maluku Utara ini tetap rawan dari kegiatan lalu-lintas senjata api gelap.⁴⁰ Itulah sebabnya tindakan razia dan pemusnahan senjata api ilegal, termasuk yang rakitan, tetap perlu diteruskan, agar kondisi keamanan domestik (lokal) tetap terkendali.

³⁵ "TNI AL Bangun Pangkalan di Melonguane," *Kompas*, 19 Juli 2011: 2.

³⁶ Wawancara dengan Sekda Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011.

³⁷ Wawancara dengan Muhamad Sadri, Redaksi Pelaksana *Maluku Post*, di Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada 17 Juli 2011; Wawancara dengan Faisal Jalaluddin, Redaksi Pelaksana *Maluku Post*, di Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada 17 Juli 2011.

³⁸ Wawancara dengan Dr. Marwan, SE, Msi, Dosen FE Universitas Khairun, Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011; Wawancara Abdul Kadir Bubu, Dosen FH Universitas Khairun, Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011; Wawancara dengan Mahmud Haji Umar, Dosen FH, Universitas Khairun, Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011; Wawancara dengan Salmid Janidi, Dosen FH, Universitas Khairun, Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011.

³⁹ Wawancara dengan para perwira Lantamal di Manado, Sulawesi Utara, pada 7 Juli 2011.

⁴⁰ Wawancara dengan Muhamad Sadri, Redaksi Pelaksana *Maluku Post*, di Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada 17 Juli 2011; Wawancara dengan Faisal Jalaluddin, Redaksi Pelaksana *Maluku Post*, di Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada 17 Juli 2011.

Pihak kepolisian Provinsi Maluku Utara, yang wilayah perairannya juga rawan dari kasus penyelundupan senjata api, mengakui kondisi ini. Dari keterangan yang diperoleh langsung dari pihak kepolisian sekitar 6 bulan belakangan di awal tahun 2011 ini berhasil disita 6 senjata api ilegal yang dibawa nelayan Filipina dengan menggunakan perahu tradisional mereka.⁴¹ Keterbatasan alat kerja, terutama kapal-kapal cepat yang memadai kapasitasnya, dan personil dikatakan sebagai penyebab sulitnya mendapatkan temuan lebih banyak atas berbagai kasus penyelundupan yang terjadi. Pihak TNI, Korem 152 Baabullah, juga mengatakan turut mendengar informasi mengenai senjata-api selundupan tersebut, walaupun belum melihat secara langsung hasil temuan atau sitaan itu, mengingat tugas mereka hanya menyangkut (ancaman) di matra darat.⁴²

Ketika konflik horizontal (primordial) tengah berkecamuk, misalnya pada 30 Mei 2000, satuan marinir berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api, pistol, dan amunisi dari berbagai jenis ke Maluku Utara, yang berupaya dimasukkan melalui dermaga ferry Bastiong, Ternate. Jumlah yang berusaha diselundupkan terdiri dari 2 pucuk M-16, 11 pucuk pistol FN-45, 10 *magazine* M-16, 532 butir peluru pistol, dan 296 butir peluru M-16.⁴³ Pemasokan senjata api secara ilegal itu kian meresahkan masyarakat yang tengah dilanda konflik. Dua bulan kemudian, tepatnya, 26 Juli 2000, di perairan Teluk Ambon, aparat Darurat Sipil di Maluku berhasil menggagalkan penyelundupan senjata yang dilakukan orang-orang RMS, dengan menumpang Kapal Pelni, KM Dobonsolo. Dari pengeledahan, berhasil disita 15 pucuk senjata organik, 200 granat tangan, dan ribuan peluru.⁴⁴ Aparat sebelumnya telah mencurigai nakhoda kapal yang tidak mau merapatkan kapalnya di pelabuhan AL Halong, namun hanya mau berhenti di tengah pelabuhan dekat Hative Besar, dalam 1 bulan terakhir. Menurut aparat keamanan upaya, penyelundupan ini telah dilakukan berulang kali, dengan jumlah senjata selundupan yang lebih banyak berhasil disita kali ini.⁴⁵ Senjata

⁴¹ Wawancara dengan Wakapolda Provinsi Maluku Utara, Kombes Drs. Krido S, MM, di Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada 20 Juli 2011.

⁴² Wawancara dengan Danrem 152 Baabullah, Kol. (Inf), Widhagdo SW, di Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada 19 Juli 2011; Wawancara dengan Kasrem 152 Baabullah, Letkol (Kav), Ade Wihanto, di Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada 19 Juli 2011; Wawancara dengan Kasie Intel Korem 152 Baabullah, Mayor (Kav), Donova di Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada 19 Juli 2011.

⁴³ "Korban Meninggal Akibat Pertikaian di Galela Diperkirakan Ratusan Jiwa," *Antara*, 31 Mei 2000, Muslims News World On-line.

⁴⁴ "RMS Menyelundupkan Amunisi," 27 Juli 2000, MHI, <http://jannah.itgo.com/ambon/22-30%20juli 2000htm>.

⁴⁵ *Ibid.*

jenis M-16 dari Ambon diduga pula ada yang berasal dari gudang senjata Brimob yang dibobol di Ambon dalam konflik tahun pasca-1998. Sedangkan senjata jenis AK-47 sudah dapat dipastikan asal selundupan dari wilayah perbatasan perairan Indonesia-Filipina Selatan, masuk melalui Pulau Miangas.⁴⁶ Pada tahun 1999, telah berkembang rumor adanya kapal dari Jakarta yang membawa 12 peti kemas yang membawa senjata api dan amunisi, yang dikabarkan disimpan di Pulau Hutumury dan Pulau Seram. Senjata-senjata tersebut diperkirakan asal Israel, Belgia dan Belanda, di antaranya senjata laras panjang jenis PNC-1.⁴⁷

Dalam peristiwa konflik komunal yang pecah lagi antara kelompok masyarakat Muslim dan Kristen di Ambon pada 11 September 2011 (satu dasawarsa sesudahnya), belum dijumpai kasus-kasus senjata api yang masuk dari luar wilayah Kepulauan Maluku, termasuk yang diselundupkan lewat jalur laut yang banyak pintunya di Ambon.⁴⁸ Namun, aparat keamanan tetap mewaspadaai penggunaan senjata api dalam konflik, termasuk senjata standar militer, mengingat senjata-senjata standar yang diperoleh dari serbuan salah satu pihak yang berkonflik ke markas Brimob pada konflik sebelumnya (periode pertama), tidak seluruhnya kembali.⁴⁹ Kerusakan dapat segera dihentikan, dan situasi keamanan dapat segera dikendalikan, sehingga pasca-konflik periode kedua ini belum ditemukan senjata api yang diselundupkan seperti di periode berlangsungnya gelombang kerusakan pertama. Juga, sekalipun ada kelompok masyarakat luar yang dicegah masuk, namun mereka hanya berusaha memasukkan senjata tajam, seperti parang dan golok, yang dibungkus seperti alat-alat pertanian. Pembawanya calon milisi salah satu kelompok, asal Tulungagung, yang berusaha masuk menggunakan pelabuhan yang sama di masa lalu seperti Surabaya.⁵⁰ Razia yang dilakukan aparat kepolisian di berbagai daerah berhasil meredam pesan SMS yang berupaya menghasut untuk melakukan jihad, dan terutama terhadap para calon penumpang di berbagai pelabuhan, ke Ambon, sehingga upaya pengiriman milisi secara massal dan senjata tajam dapat dicegah.⁵¹

⁴⁶ Aldi Gultom, "Senjata Api Perampok Bersal dari Sisa Konflik Ambon dan Aceh," *Rakyat Merdeka Online*, 20 Agustus 2010, <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=1701>.

⁴⁷ "Ada Senjata di antara Huru-hara," *Tajuk.com*, 7 Oktober 1999, <http://www.tajuk.com/edi-si16th2/fokus/fokus04/fokus-con-tent.html>.

⁴⁸ Wawancara dengan Kol. (Mar) Bambang H., Wadan Lantamal IX Ambon pada 22 September 2011 di Ambon.

⁴⁹ Wawancara dengan Kol. Nazaruddin, Danrem 151/Binaiya, Provinsi Maluku pada 23 September 2011 di Ambon.

⁵⁰ Siaran TVRI pada 15 September 2011.

⁵¹ Wawancara dengan Kombes Nasan Hutahaen, Direktur Intelkam, Harianto Kabag Analisa Direktorat Intelkam, dan perwira intel Direktorat Intelkam Polda Maluku pada 20 September 2011 di Ambon.

Aparat keamanan laut Indonesia memiliki keterbatasan untuk mengontrol wilayah perairan dan jajaran pulau-pulau yang tersebar di Utara Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku. Tidak heran dalam masa Perang Dunia II dan upaya mempertahankan kemerdekaan RI, pelaku gerakan separatis dan penjajah dan negara asing, sulit dicegah masuk ke wilayah ini untuk menguasainya. Para pengikut Permesta, angkatan laut pemerintah kolonial Belanda dan sekutu di bawah pimpinan AS dan Australia, sebagaimana pasukan Jepang berusaha masuk ke wilayah RI melalui pulau terluar di Provinsi Maluku Utara, yakni Morotai, sebagai batu loncatan untuk masuk ke dan menguasai Indonesia.⁵²

B. Negara Asal Penyelundupan

Mabes Polri telah berupaya melakukan penyelidikan awal negara asal penyelundup. Seperti dikatakan Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Soenarko D. Ardanto, dari kasus yang pernah ditangani Mabes Polri, diketahui asal senjata selundupan dari Thailand. Para pembeli yang membawa senjata api ilegal ke Indonesia biasanya melakukan transaksi di Perairan Pulau Adang, Thailand.⁵³

Thailand Selatan telah diidentifikasi sebagai sumber senjata selundupan, mengingat letaknya yang dekat dengan perbatasan perairan pulau-pulau terluar Indonesia. Bagi pemerintah Thailand sendiri wilayah tersebut masih sulit dikontrol oleh aparat keamanannya sampai sekarang ini karena merupakan basis gerakan separatis, yang belum sepenuhnya dikuasai mereka. Selain itu, Thailand Selatan juga berdekatan dengan negara Kampuchea, negara yang baru menyelesaikan perang saudara dan konflik berkepanjangan, sehingga banyak senjata-senjata eks-konflik yang luput dari kontrol pemerintah domestik dan diperjualbelikan.

Baik di bekas wilayah konflik separatisme Aceh ataupun bekas konflik-konflik sektarian Maluku dan Poso, senjata-senjata yang beredar dan digunakan pihak-pihak yang bertikai, termasuk yang telah digunakan dalam melawan aparat keamanan selama ini, sumbernya tetap sama, yaitu dari Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan Kampuchea. Kepala Divisi Humas

⁵² Wawancara dengan Sultan Ternate, Mudaffar Sjah di Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada 18 Juli 2011.

⁵³ *Ibid.*

Mabes Polri, Irjen Iskandar Hasan, yang pernah ke wilayah Thailand Selatan, menengarai besarnya kemungkinan senjata-senjata asal wilayah itu yang dimanfaatkan oleh bekas pihak-pihak yang bertikai untuk diperdagangkan demi meraih keuntungan finansial.⁵⁴

Selain Thailand Selatan, sumber pasokan senjata selundupan adalah Filipina Selatan, yang juga tengah mengalami konflik separatis dan sektarian. Bahkan, lebih luas lagi kawasan itu telah berkembang menjadi tempat berlindung atau *safe haven* bagi para aktor non-negara atau kelompok teroris lintas-kawasan, di luar MNLF, MILF, yaitu mereka yang diidentifikasi sebagai Kelompok Al-Qaeda Asia Tenggara. Wilayah yang berbentuk kepulauan dan menjorok ke dalam telah menyulitkan aparat keamanan domestik dan negara lain untuk menjangkau dan mengontrol mereka, namun sebaliknya sangat ideal bagi para penyelundup karena letaknya saling terhubung dengan wilayah-wilayah terluar kepulauan Indonesia dan langka dari patroli keamanan lintas negara.

Untuk senjata-senjata ilegal yang masuk melalui Filipina Selatan, kasusnya terus terjadi pasca-konflik separatis dan komunal (primordial) di Aceh, Poso dan Ambon. Pada 5 Juli 2011 diberitakan, polisi anti-teror telah menangkap 7 orang yang diduga terlibat jaringan penyelundupan dan perdagangan senjata api yang dipasok melalui jalur pelayaran Tawau (Malaysia), Nunukan, Kalimantan Timur, Palu dan Surabaya.⁵⁵ Pelakunya selama ini terlibat tindak pidana terorisme di Surabaya dan Jakarta. Di Surabaya berhasil ditangkap 2 orang, sedangkan di Jakarta 5 orang. Terdapat 1 pucuk M-16, 5 pucuk FN, dan 1 mitraliur sebagai barang bukti senjata api yang disita di Surabaya, dan 2 pucuk M-16 yang berhasil disita di Jakarta.⁵⁶ Banyaknya tersedia senjata dari berbagai jenis yang dapat dibeli secara bebas di wilayah Filipina Selatan yang berbatasan langsung dengan perairan di pulau-pulau utara Sulawesi dijelaskan oleh pihak Polisi Air, terutama Lantamal VIII.⁵⁷ Di wilayah perairan utara Kepulauan Sulawesi, penyelundupan senjata lebih rawan terjadi (masuk) melalui pelabuhan-pelabuhan Kelas IV di sekitar pulau terluar, seperti Marore, yang berbatasan langsung dengan Filipina Selatan,

⁵⁴ Ismoko Widjaya dan Eko Huda S, "1000 Pucuk Senjata Eks GAM Masih Beredar," *Viva-news*, 25 September 2010, <http://nasional.vivanews.com/news/read/179511-30-persen-sen-jata-ek...>

⁵⁵ "Dibongkar Jaringan Pemasok Senjata," *Kompas*, 6 Juli 2011: 2.

⁵⁶ Keterangan Kabag Penerangan Umum Polri, Kombes Boy Rafli Amar, *ibid*.

⁵⁷ Penjelasan dan wawancara dengan Polisi Air dan Lantamal VIII masing-masing di Bitung dan Manado pada tanggal 5 dan 7 Juli 2011. Di Nunukan/Tarakan terdapat Lanal yang berada di bawah pengendalian dan tanggung jawab Lantamal VIII.

wilayah pemasoknya.⁵⁸ Jalur lintas Filipina Selatan ke pulau-pulau di bagian terluar di utara Kepulauan Sulawesi amat rawan sebagai jalur lintas penyelundupan senjata dan transit para anggota kelompok radikal di Indonesia dalam aktifitas terorisme mereka dengan jaringan mereka yang sudah terbentuk dan tersebar di kawasan Asia Tenggara.⁵⁹

Sampai pada tahun 2003, terlacak 2 tempat pemasokan senjata api ilegal yang mencolok, yaitu di daerah Solo (Jawa Tengah) dan di Pulogadung (Jakarta). Namun, berbeda dengan senjata api yang biasa disuplai ke beberapa daerah konflik, yang biasanya diperoleh dari Kampuchea melalui Thailand dan Filipina, senjata api di 2 tempat itu diduga berasal dari negara bekas Yugoslavia dan Israel.⁶⁰ Di daerah Solo sempat dilaporkan bahwa terdapat sekitar 400 pucuk senjata api laras panjang, walaupun polisi gagal menemukannya. Di Pulogadung, polisi telah menemukan 8 peti berisi 50 pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 dan Uzi, serta 57 pucuk pistol.⁶¹ Senjata api tersebut bisa masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Priok.

III. Pembahasan

Lemahnya penegakan hukum diperparah oleh lemahnya kordinasi antaraparat yang berwenang dalam mencegah dan menangani kasus-kasus yang merupakan tantangan bagi negara kepulauan seperti Indonesia, sebagaimana diakui oleh Jaleswari Pramowardhani dari LIPI dan Abdul Hamid dari LSM Kiara, yang keduanya banyak mengamati persoalan-persoalan negara maritim.⁶² Kondisi seperti ini dihadapi oleh Indonesia pula dalam merespons masalah penyelundupan senjata. Kekurangpekaan terhadap ancaman yang datang matra laut dan pengembangan sektor kelautan telah membuka peluang bagi terjadinya berbagai bentuk kejahatan transnasional. Karena cara pandang seperti ini yang belum berubah dalam Orde Reformasi, yang masih berorientasi ke matra darat dan belum memperlihatkan prioritas atau berganti ke paradigma laut sekalipun Panglima TNI pernah dijabat oleh 2 orang perwira tinggi AL, selain Indonesia telah memiliki seorang Menteri

⁵⁸ Wawancara dengan pihak Adpel dan Pelindo Bitung di Bitung pada 6 Juli 2011.

⁵⁹ Penjelasan dan wawancara dengan pihak Lantamal VIII di Manado pada tanggal 7 Juli 2011.

⁶⁰ Riza Sofyat dan Budi Supriyanto, "Senjata Ilegal di Jakarta," *Majalah Trust*, .com, <http://www.majalah-trust.com/verboden/verboden/503.php>.

⁶¹ *Ibid*.

⁶² Tanya jawab dalam diskusi dengan keduanya dalam FGD di P3DI pada 31 Maret 2011.

Kelautan asal TNI-AL,⁶³ para pelaku kejahatan penyelundupan senjata melihat peluang yang besar untuk terus melakukan kegiatannya dengan pelaku dan modus lama ataupun baru.

Maraknya konflik-konflik di berbagai daerah, terutama separatistis dan sektarianisme sejak reformasi politik bergulir tahun 1998, telah memarakan pula bisnis jual-beli senjata api gelap, termasuk yang berasal dari kegiatan penyelundupan. Berkembangnya rasa tidak aman di masyarakat pasca-krisis moneter, meningkatnya permintaan senjata api oleh pihak-pihak yang berkonflik di wilayah-wilayah yang dilanda kerusuhan atau konflik, adanya perbedaan yang mencolok antara harga senjata resmi dan ilegal, lemahnya kontrol atau pengawasan atas peredaran dan pemakaian senjata api selundupan, dan lemahnya kontrol pemilikan senjata aparat kian menambah faktor penyebab atau motivasi aksi-aksi penyelundupan senjata. Maraknya penyelundupan senjata api dari kawasan Selatan Filipina dan Thailand ke wilayah Aceh ketika konflik separatisme tengah memanas di sana dibenarkan oleh Abriadi dari Badan Kordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla).⁶⁴

Dari bekas wilayah konflik separatisme di Aceh, harga senjata api dulunya diperjuabelikan dengan harga yang tinggi, yaitu sekitar Rp. 30-40 juta setiap pucuknya.⁶⁵ Sehingga, ketika konflik usai, mereka yang telah kehilangan uang untuk membeli senjata, akan berupaya menjual senjatanya kembali kepada siap saja agar kembali modal. Luputnya hal ini dari perhatian *peace makers* di Aceh, telah menyulitkan upaya mengembalikan keamanan Aceh dan menjaga keamanan wilayah Indonesia dari dampak peredaran senjata-senjata api hasil selundupan dari bekas wilayah konflik. Di Aceh diperkirakan terdapat sekitar 1000-1500 pucuk senjata yang masih beredar.⁶⁶

Kesenjangan harga antara senjata selundupan dan lokal pada waktu konflik muncul di banyak daerah, telah mendorong maraknya kasus-kasus penyelundupan senjata. Ketika konflik Aceh sedang memanas, harga sepucuk senjata laras panjang AK-47 ilegal mencapai Rp. 40 juta. Padahal, di pasar gelap Mindanao, Filipina Selatan, harganya hanya sekitar Rp. 5 juta.⁶⁷ Memasukkannya pun tidak sulit,, karena lemah dan bobroknya birokrasi

⁶³ Ini merupakan warisan sejarah politik selama berabad-abad lamanya setelah runtuhnya pusat-pusat kerajaan maritim di Indonesia, yang kemudian digantikan dengan kerajaan-kerajaan agraris yang berpusat di pedalaman, yang sangat *inward looking*.

⁶⁴ Wawancara dengan Abriadi di Kantor Bakorkamla pada 21 April 2011 di Jakarta.

⁶⁵ Widjaya dan Huda S, 2010, *loc. cit*.

⁶⁶ *Ibid*.

⁶⁷ Nugroho dan Patria, *loc. cit*.

keimigrasian di Filipina yang letaknya berdekatan dengan Sulawesi Utara. Dengan modal rokok dan sejumlah uang Peso, mudah meloloskan senjata keluar dari wilayah Filipina Selatan itu.

Selanjutnya, senjata diangkut dengan kapal laut dan diselundupkan lewat jalur General Santos-Sangir Talaud-Bitung, Sulawesi Utara. Dari rute ini, senjata diselundupkan dan disebar ke wilayah konflik di Indonesia yang membutuhkannya. Ketika konflik sektarian dan separatistis memanas di Ambon dan Poso, jalur selundupan itu begitu hidup, sehingga Mindanao menjadi surga bagi peredaran dan suplai senjata ilegal bagi kedua kelompok yang bertikai, dari kalangan Muslim dan Kristen. Sebagaimana diungkap sumber seorang anggota Mujahidin Kompak, kelompok jihad seperti Jamaah Islamiyah (JI), Mujahidin Kompak, Laskar Jundulah, Darul Islam wilayah Banten berbelanja senjata di wilayah Filipina Selatan tersebut.⁶⁸ Demikian pula dengan kelompok lawan mereka (merah) dalam konflik di Ambon. General Santos diketahui sebagai kota paling Selatan di Pulau Mindanao, pulau yang berbatasan langsung dengan wilayah Sangir Talaud, Sulawesi Selatan, yang juga memiliki penduduk dari kalangan Muslim. Perlakuan aparat keamanan dan birokrasi di wilayah Filipina Selatan dan kebutuhan warga sipil akan uang, telah membuat harga senjata begitu murah di sana. Sepucuk senjata M-16 asal AS bisa dibeli dengan harga 30 ribu Peso atau sekitar Rp. 6 juta sampai 45 ribu Peso atau sekitar Rp. 9 juta, termasuk 8 buah magazin dan rompinya.⁶⁹

Kasus-kasus penyelundupan senjata di masa lalu yang terjadi melalui perairan Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina (Selatan) sulit dilepaskan dari kondisi keterbelakangan (kemiskinan) atau kesulitan hidup yang dihadapi nelayan pada umumnya. Motif ekonomi mendesak mereka untuk membawa apa saja dari wilayah yang tidak stabil di negara tetangga itu ke wilayah yang tengah bergolak di Indonesia. Tokoh nelayan sendiri tidak menutup mata terhadap kemungkinan berlangsungnya kasus-kasus seperti ini di masa lalu.⁷⁰ Begitu pula dengan aparat keamanan, yang melihat motif lain, yakni perjuangan ideologis sebagai alasan dibawanya senjata secara langsung oleh anggota kelompok radikal yang memang telah mempunyai jaringan yang kuat dengan kelompok serupa di wilayah Filipina Selatan. *Modus operandi* untuk dua motif yang berbeda ini sama, yaitu menggunakan kapal-

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Wawancara dengan Dr. Rignolda Djamiluddin, Ketua Antra (Asosiasi Nelayan Tradisional Sulut), di Manado pada tanggal 4 Juli 2011.

kapal kecil dengan singgah atau memanfaatkan jalur pelayaran melalui banyak pulau kecil yang tersebar di utara perairan Sulawesi Utara di antara Kabupaten Sangir, Talaud, Marore dan Miangas.⁷¹ Dari sini para pelaku berupaya lolos dari pengawasan dan pengejaran aparat keamanan, terutama patroli AL, yang kapasitas alatnya terbatas, dan membawa senjata ke arah Tawau, perbatasan Malaysia-Indonesia, Sebatik, Nunukan, dan masuk ke Kalimantan melalui Tarakan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.⁷² Pada 5 Juli 2011 telah tertangkap para teroris yang berencana menyerang langsung kantor-kantor dan aparat kepolisian. Mereka yang tertangkap itu diduga berhubungan dengan kelompok pejuang/pemberontak radikal di Filipina untuk memasok senjata, termasuk senjata berperedam suara untuk melaksanakan rencana rangkaian pembunuhan terhadap aparat kepolisian yang mereka anggap sebagai penguasa jahat (*thogut*). Para pelaku telah ditangkap di Jakarta dan Surabaya. Dari mereka telah disita 1 pucuk senjata api jenis M-16, 5 pucuk senjata api jenis FN, dan 1 mitraliur.⁷³

Selanjutnya ada yang membawanya terus ke Aceh melalui perbatasan laut Malaysia-Indonesia di sekitar Pulau Sumatra dan Kepulauan Riau. Begitu pula, dari perairan di Sulawesi Utara ada yang membawa senjata masuk ke pedalaman, melalui pulau-pulau kecil hingga ke pedalaman Sulawesi, sampai ke wilayah konflik primordial, di Poso. Jika tidak, dari perairan di utara Sulawesi, senjata gelap yang dibeli dari wilayah Filipina Selatan, yang berasal dari eks-MNLF dan MILF, dibawa oleh pengikut kelompok radikal ke Kepulauan Maluku dan Maluku Utara, masuk dan melewati Halmahera, Ternate, Tidore dan seterusnya. Di luar senjata, diketahui selama ini bahan-bahan kimia untuk pupuk dan bom ikan rawan untuk dibawa masuk secara ilegal. Tentu saja bahan-bahan berbahaya tersebut dapat diracik dan dipergunakan sebagai bahan peledak untuk tujuan terorisme dan aksi-aksi kekerasan (konflik) komunal.⁷⁴

Kasus-kasus penyelundupan senjata gelap yang marak masuk dari Filipina Selatan ke Provinsi Maluku melalui Provinsi Maluku Utara terjadi ketika konflik horizontal pecah di wilayah Indonesia Timur tersebut, yang dimotivasi untuk kepentingan berperang atau mempertahankan diri kedua belah pihak

⁷¹ Penjelasan dan wawancara dengan Polisi Air di Bitung dan Lantamal VIII di Manado, masing-masing pada tanggal 5 dan 7 Juli 2011.

⁷² "Dibongkar Jaringan Pemasok Senjata," *Kompas*, 6 Juli 2011, *loc. cit.*

⁷³ "Kelompok yang Ditangkap Terkait Filipina," *Kompas*, 7 Juli 2011: 4.

⁷⁴ Antara lain, penjelasan dan wawancara dengan Dr. Rignolda Djamaluddin, Ketua Antra (Asosiasi Nelayan Tradisional Sulut), di Manado pada tanggal 4 Juli 2011.

yang bertikai atau berhadap-hadapan, yakni Kelompok Merah (Kristen) dan Putih (Muslim). Di luar itu, pihak ketiga menggunakannya untuk kepentingan meraih keuntungan dari senjata-senjata yang tersedia dan diperdagangkan bebas di banyak pasar gelap di Filipina Selatan. Pembeli bisa datang langsung ke negara tetangga yang berbatasan letaknya dan tidak jauh posisinya dari wilayah konflik. Sedangkan pihak ketiga bisa menggunakan perantara nelayan-nelayan tradisional yang sangat menguasai wilayah perairan dimaksud, yang menggunakan perahu-perahu kecil mereka. Kondisi geografis wilayah perairan di dekat perbatasan Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku (Utara) dengan Filipina (Selatan) yang tersembunyi dan dikelilingi banyak pulau kecil, keterbatasan fasilitas aparat keamanan laut Indonesia, dan sikap ambivalen mereka dalam mengatasi konflik primordial atau perang saudara yang tengah berlangsung, sangat membantu mereka yang berkepentingan dengan bisnis senjata-senjata ilegal ini. Tidak heran ketika itu granat, selain senjata api laras pendek dan panjang, juga yang dimasukkan ke sana.⁷⁵

Provinsi Maluku Utara yang mewarisi kondisi masyarakat yang terfragmentasi dalam kelompok agama, etnik dan stigmatisasi golongan dan lokasi tempat tinggal (di pulau yang berbeda, misalnya, antara Ternate dan Tidore), dan rasa saling curiga yang diwarisi sejak jaman penjajahan Belanda dengan politik pecah-belahnya (*divide et impera*), memiliki potensi konflik yang tinggi, yang bisa dipicu banyak hal, yakni ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan lokal, hasil pemilukada, peredaran miras, dan masalah yang sepele sekalipun, seperti tawuran individual antar-warga.⁷⁶ Semua kejadian konflik kecil dapat bermuara menjadi konflik komunal, horizontal, dan vertikal. Karena itu, kondisi masyarakat lokal yang rawan konflik —konflik sudah menjadi “bahaya laten”— ini tetap menjadi pasar yang potensial bagi perdagangan senjata api di masa pasca-konflik besar di antara kurun waktu 1999–2001, khususnya bagi mereka yang berkepentingan dengan bisnis ini.⁷⁷ Lokasi pasar

⁷⁵ Juga tersingkap dari wawancara dengan Abdul Kadir Bubu, Dosen FH Universitas Khairun, di Ternate, Provinsi Maluku Utra, pada 16 Juli 2011; Wawancara dengan Mahmud Haji Umar, Dosen FH, Universitas Khairun, Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011.

⁷⁶ Wawancara dengan Sekda Kota Ternate, Isnain Ibrahim, di Ternate, pada 15 Juli 2011. Rapuhnya kondisi keamanan di masyarakat dapat dilihat dari tawuran antar-warga (Mangga Dua melawan Ubo-ubo) yang muncul lagi di Kota Ternate, yang bermula dari masalah pribadi, pada 9 Juli 2011, yang telah menyebabkan 2 orang tewas dan situasi sempat memanas karena adanya aksi tuntutan balas dari kelompok warga yang menjadi korban. Lihat juga, misalnya, *Mimbar Malut*, 16 Juli 2011 dan *Malut Post*, 19 Juli 2011.

⁷⁷ Wawancara dengan Abdul Kadir Bubu, Dosen FH Universitas Khairun, di Ternate, Provinsi Maluku Utra, pada 16 Juli 2011; Wawancara dengan Mahmud Haji Umar, Dosen FH, Universitas Khairun, Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011.

penjual senjata di Filipina Selatan yang masih tidak stabil dan tidak dapat dikontrol otoritas keamanan (pemerintah) Filipina Selatan sehingga dengan bebas menyediakan berbagai jenis senjata api. Apalagi lokasinya yang tidak jauh dari perairan laut bebas di Provinsi Maluku Utara yang juga berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik, membuat kawasan kepulauan di provinsi ini, menjadi tempat yang potensial untuk pemasaran senjata api gelap (selundupan).⁷⁸

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari temuan penelitian tampak bahwa wilayah Indonesia rawan terhadap berbagai aksi penyelundupan senjata. Karena bentangan wilayah yang luas, dan kemampuan kontrol aparat keamanan yang amat terbatas, jalur perairan di Indonesia di Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara, sangat rawan digunakan untuk memasukkan senjata-senjata api ilegal. Wilayah perbatasan, terutama dengan Thailand dan Filipina Selatan, merupakan sumber utama pengaliran senjata dari luar negeri, sebelum singgah di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia dan masuk jauh ke wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

Adapun jenis-jenis senjata api yang seringkali diselundupkan meliputi senjata api genggam dan berlaras pendek dan panjang. Demikian pula, dilihat dari teknologi yang dimilikinya, merupakan senjata-senjata api berjenis semi-otomatis atau otomatis. Sedangkan asal negara pembuatnya beragam, terutama Eropa, seperti Rusia, Jerman, dan AS. Dilihat dari motivasi penyelundupannya pun beragam, tidak semata ekonomi, tetapi juga untuk tujuan politik dan ideologi.

Untuk mencegah aksi-aksi dan dapat menangkap para pelaku penyelundupan senjata yang berupaya masuk ke Indonesia yang memiliki garis pantai yang begitu panjang, perlu dilakukan peningkatan patroli keamanan, terutama di sepanjang perairan pulau-pulau terluar, oleh TNI-AL, Kepolisian Udara dan Air, TNI-AU dan aparat keamanan lain terkait. Hal ini berarti perlu peningkatan kapabilitas mereka dan peralatan pendukungnya. Dengan kata lain, perlu ditingkatkan pelaksanaan kebijakan *security belt*,

⁷⁸ Wawancara dengan Dr. Marwan, SE, Msi, Dosen FE Universitas Khairun, Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011; Wawancara dengan Salmid Janidi, Dosen FH, Universitas Khairun, Ternate, Provinsi Maluku Utara, di Ternate pada tanggal 16 Juli 2011.

termasuk lewat peningkatan peran lembaga perbatasan yang sudah terbentuk. Sedangkan di ALKI dan wilayah perairan internasional perlu ditingkatkan kerja sama antarnegara, tidak hanya bilateral tetapi juga melibatkan lebih dari dua negara, terutama negara tetangga yang wilayah perairannya berbatasan langsung dengan Indonesia. Dalam konteks ini, berbagai bentuk latihan pengamanan bersama perlu ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya, seperti yang dilakukan dengan negara-negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.

Secara spesifik, perlu dilakukan lebih banyak lagi pemasangan radar di sepanjang wilayah perairan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara untuk dapat memantau secara lebih baik lalu-lintas kapal yang melewati jalur perairan tersebut. Sebagai konsekuensinya, perlu alokasi anggaran untuk kebutuhan pengamanan laut, termasuk untuk pembelian dan pemasangan radar. Hibah radar dari negara lain, seperti AS tidaklah cukup untuk bisa mengamankan seluruh wilayah perairan dan garis pantai Indonesia yang rawan dari kegiatan penyelundupan senjata api.

Yang lebih penting lagi dari itu, kehadiran sebuah UU Kelautan yang memadai dalam merespons berbagai tantangan dan masalah di sepanjang garis pantai dan perairan (pulau-pulau) terluar Indonesia dari tindak penyelundupan senjata api, sangat diperlukan. Hanya dengan adanya UU ini, berbagai kebijakan kelautan lain dapat ditindaklanjuti dengan baik dan dilindungi pelaksanaannya dalam jangka panjang.

Kontrol pemerintah daerah atas keamanan wilayah lautnya harus dapat ditingkatkan, tanpa tergantung terus-menerus pada kemampuan pengamanan yang dilakukan pemerintah pusat melalui institusi TNI dan kementerian terkait lainnya di Jakarta. Dengan demikian, aksi pengamanan melalui Bakorkamla, Lanal, Lanud, dan kepolisian dapat ditingkatkan dan dikordinasikan secara maksimal, dengan pendirian basis operasi atau pangkalan mereka di pulau-pulau terluar. Selanjutnya, perbaikan UU mengenai perbatasan dan wilayah pesisir melalui proses amandemen akan jauh lebih menolong peningkatan pengawasan keamanan atas kedaulatan Indonesia di wilayah perairan terdepan, yang rawan dari segala bentuk tindak pidana kejahatan transnasional, khususnya penyelundupan senjata api.

Daftar Pustaka

- "Ada Senjata di antara Huru-hara," *Tajuk.com*, 7 Oktober 1999, <http://www.tajuk.com/edisi16th2/fokus/fokus04/fokuscontent.html>.
- Barry Buzan, *People, States and Fear. An Agenda fro International Security Studies in the Post-Cold War Era*, New York, Harvester Wheatsheaf, 1991.
- Barry Buzan. Ole Waever, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner, 1998.
- "Dibongkar Jaringan Pemasok Senjata," *Kompas*, 6 Juli 2011.
- Gultom, Aldi. "Senjata Api Perampok Bersal dari Sisa Konflik Ambon dan Aceh," *Rakyat Merdeka Online*, 20 Agustus 2010, <http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=1701>.
- Harvey, Robert. *Global Order*, Carrol and Graf, 2003.
- "Jabatan Pangdam I/BB Diserahterimakan," website TNI, <http://www.server.tni.mil.id>, diakses 21
- "Kelompok yang Ditangkap Terkait Filipina," *Kompas*, 7 Juli 2011: 4.
- "Kolaborasi Indonesia-Filipina demi Eliminasi Penyelundupan Senjata," *Media Indonesia*, 22 Maret 2010, <http://www.mediaindonesia.com/read/2...ndupan-Senjata>
- "Korban Meninggal Akibat Pertikaian di Galela Diperkirakan Ratusan Jiwa," *Antara*, 31 Mei 2000, Muslims News World Online.
- "Kulakan Senjata ke Mindanao," *Viva News*, 24 September 2010, <http://sorot.vivanews.com/news/read/179464-jejak-gerilya-filipina-k...>
- L. David Brown. *Practice-Research Engagement and Civil Society: In a Globalizing World*. Washington DC and Massachussets: Civicus and the Hauser Center
- Malut Post*, 19 Juli 2011.
- Mimbar Malut*, 16 Juli 2011.
- Nugroho, Yuniawan Wahyu dan Nezar Patria, "Kulakan Senjata ke Mindano," *VIVAnews*, 24 September 2010, <http://sorotviva-news.com/news/read/179464-jejak-gerilya-filipina-k...>
- Patria, Nezar, Suryanta Bakti Susila dan Iwan Kurniawan, "Membongkar Jejak Senjata Teroris," *Viva News*, 24 September 2010, <http://sorot.vivanews.com/news/read/179459-melacak-jejak-senjata-haram>.

- "Perampokan Bank CIMB Niaga Medan: Kapolda: Sumut Rawan Penyelundupan Senjata Api," *VHRmedia.com*, 19 Agustus 2010, <http://www.Vhrmedia.com/Kapolda-Sumut-Rawan-enyelundupan-Sen...>
- "Polisi Gagalkan Penyelundupan Senjata Api," *Indo Warta*, 18 Maret 2009, <http://www.indowarta.com/index.php?option=com-content&view=art..>
- "RMS Menyelundupkan Amunisi," 27 Juli 2000, MHI, [http://jannah.itgo.com/ambon/22-30%20juli 2000htm](http://jannah.itgo.com/ambon/22-30%20juli%202000htm).
- "TNI AL Bangun Pangkalan di Melonguane," *Kompas*, 19 Juli 2011: 2.
- Umar, M. Husseyn. *Hukum Maritim dan Masalah-masalah Pelayaran di Indonesia* (Buku 1,2,dan 3). Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Wowor, Landy. "Senjata Selundupan: Senjata Lewat jalur Lama," *Gatra*, No. 18/VI, 18 Maret 2000, <http://www.gatra.com/VI/18/NAS2-18.html>.